

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan. berikut hasil penelitian tersebut:

Penelitian dari Deasy Ariyanto, *Journal of management Review* tahun 2018 dengan judul “Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah”. Penelitian ini bertujuan ingin diperoleh yaitu untuk mengetahui koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas BPBD dan hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi kelembagaan guna meningkatkan BPBD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dengan dinas/instansi lainnya (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan), sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Begitu pula hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian indikator dari koordinasi telah dilaksanakan dengan baik, namun sebagian lagi masih kurang bahkan ada yang belum dilaksanakan seperti pembinaan, konsultasi dan pengarahan melalui pertemuan resmi dan rutin.

Penelitian berikutnya, penelitian dari Biyan Anugrah Awusi, Herman Nayoan, dan Jones Tompodung. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2018 dengan judul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kota Manado dalam Upaya Menanggulangi Korban Bencana Banjir. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Manado dalam pencapaiannya sebesar 70% dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan dan wawancara serta data yang di peroleh maka dapat diketahui “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota manado tercapai 70 % dari maksimal 80 %. Dari setiap data yang di peroleh dari warga sekitar dan juga yang berasal dari dinas BPBD permasalahan bukan hanya di dapati dari BPBD atau dari setiap keanggotaan perbidang di BPBD, akan tetapi di dapati juga dari masyarakat yang tidak sesuai dengan ekspetasi di visi BPBD.

Penelitian berikutnya, penelitian dari Devi Erlia, Rosalina Kumalawati, Nevy Farista Aristin, Jurnal Pendidikan Geografi tahun 2017 dengan judul “Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar”. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi

bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data primer diperoleh melalui observasi di lapangan, penyebaran kuesioner dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir berada pada tingkat sedang dan tingkat kesiapsiagaan pemerintah menghadapi bencana banjir berada pada tingkat sedang. Kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir berada pada tingkat sedang.

Penelitian berikutnya, penelitian dari Dio Mahardika, Endang Larasati Setianingsih, skripsi tahun 2018 dengan judul “Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen dan faktor penghambat serta pendukung BPBD Semarang dalam penanggulangan banjir di Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan menggunakan metode studi kasus pada manajemen strategi Ramli (2010) Pra-bencana, saat kejadian bencana, dan pasca bencana. Hasil penelitiannya adalah Tahapan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Semarang melalui tiga tahapan, dimana pra-bencana yang masih terdapat kekurangan berupa *contingency plan*, langkah kedua atau pada saat terjadi bencana masih kekurangan logistik dan pelaksana darurat bencana serta yang terakhir pasca banjir masih ditemuinya rehabilitasi korban yang salah sasaran.

Tabel 2.1 Matrix Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Deasy Ariyanto (jurnal, 2018).	Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Metode penelitian yang digunakan	1. Teori yang digunakan 2. Lokus penelitian
2	Biyang Anugrah Awusi, Herman Nayoan, dan Jones Tompodung, (Jurnal 2018).	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir.	1. Metode penelitian yang digunakan	1. Teori yang digunakan 2. Lokus penelitian
3	Devi Erlia, Rosalina Kumalawati, Nevy Farista Aristin, (Jurnal 2017).	Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Dan Pemerintah Menghadapi Bencana Banjir Di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.		1. Teori yang digunakan 2. Lokus penelitian 3. Fokus penelitian 4. Metode penelitian
4	Dio Mahardika, Endang Larasati Setianingsih, (skripsi 2018).	Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Semarang.	1. Metode penelitian yang digunakan	1. Teori yang digunakan 2. Lokus penelitian

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Koordinasi

Dalam suatu organisasi, setiap pimpinan harus mengkoordinasikan kegiatan anggota organisasi yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas. Ketika memberikan informasi yang jelas, komunikasi yang baik dan pembagian kerja kepada bawahan, maka setiap bawahan akan bekerja sesuai dengan wewenang yang

diberikan.¹ Menurut Hasibuan (2006), Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan para anggota dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi Hasibuan lebih mengarah pada suatu proses penyatuan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Hasibuan berpendapat bahwa indikator yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya;

3. Pembagian Kerja perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas;

4. Disiplin.

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.²

¹ Poli, C. R., Kasena, V., & Monintja, D. K. (2022). Koordinasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Wisata Bukit Kasih Pada Masa Pandemi Covid-19. *GOVERNANCE*, 2(1).

² Hasibuan, M. S. P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Menurut Brech Koordinasi ialah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.³

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas dapat dikemukakan suatu persamaan bahwa koordinasi berarti mengatur, mempersatukan atau mengintegrasikan kepentingan bersama guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Pentingnya koordinasi untuk mencegah terjadinya kekacauan pada suatu kerja sama dan dapat mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut, setelah mengetahui pentingnya koordinasi maka perlu diketahui hal-hal secara umum dan khusus menurut para ahli. Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu proses koordinasi yang menghubungkan berbagai kegiatan atau unsur sedemikian rupa sehingga di satu pihak semua kegiatan atau unsur tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan di pihak lain tidak merugikan tercapainya keberhasilan orang lain.

A. Koordinasi Dalam Organisasi Publik

Koordinasi secara umum adalah manajemen dalam suatu organisasi dan manajemen yang menyatukan peran para pelaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin gerak

³ GINTING, J. F. (2019). *Analisis Koordinasi Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo* (Doctoral dissertation, Universitas Quality).

organisasi menuju tujuan bersama. Tanpa koordinasi, semua bagian organisasi bergerak maju sesuai dengan kepentingannya, tetapi terlepas dari peran bagian lain

dalam organisasi dan peran masing-masing bagian individu, pencapaian tujuan bersama tidak pasti. Organisasi memiliki struktur dan tujuan tertentu, saling berhubungan, dan mengandalkan komunikasi antara orang-orang untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam organisasi.

Dalam konteks pemerintah atau sektor publik, tujuan ini sering kali berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan publik. Setiap unit atau departemen dalam organisasi publik memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik. Koordinasi melibatkan penjelasan tentang peran dan tanggung jawab ini, dan memastikan bahwa setiap unit memahami bagaimana tugas mereka berhubungan dengan tugas lainnya dalam organisasi. Koordinasi efektif memerlukan komunikasi dan pertukaran informasi yang baik antara berbagai bagian dari organisasi. Ini mungkin melibatkan pertemuan reguler, laporan, dan sistem manajemen informasi untuk berbagi data dan pembaruan.

Organisasi publik sering kali perlu merencanakan dan menjadwalkan berbagai aktivitas, seperti pelaksanaan program atau proyek, untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling efektif. Koordinasi memastikan bahwa perencanaan dan penjadwalan ini diselaraskan di seluruh organisasi.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua arti yang berkaitan, karena koordinasi hanya dapat dicapai dengan baik melalui hubungan industrial yang

efektif. Hubungan industrial adalah bentuk tata kelola yang membantu koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi adalah tercapainya koordinasi yang efektif dan efisien. Koordinasi adalah upaya untuk menyatukan operasi unit kerja organisasi sehingga organisasi bertindak sebagai satu kesatuan dan memenuhi semua tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.⁴ koordinasi merujuk pada proses mengatur berbagai elemen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Namun, di balik kesederhanaan definisi ini, koordinasi memiliki implikasi mendalam dalam mendorong keberhasilan dan keberlanjutan sebuah sistem atau organisasi.

Pertama, koordinasi memungkinkan berbagai pihak dengan beragam keahlian, pengetahuan, dan sumber daya untuk bekerja bersama dalam mengejar tujuan bersama. Sebagai contoh, dalam sebuah proyek pembangunan, koordinasi yang baik antara arsitek, insinyur, pekerja, dan pihak lainnya sangat penting untuk memastikan proyek tersebut berjalan lancar dan efisien. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, dan koordinasi memastikan bahwa semua peran tersebut saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.

Kedua, koordinasi membantu mencegah atau meminimalisir konflik dan kesalahpahaman. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana peran mereka berinteraksi dengan peran orang lain. Ini dapat membantu mencegah

⁴ GINTING, J. F. (2019). *Analisis Koordinasi Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo* (Doctoral dissertation, Universitas Quality).

konflik yang mungkin muncul karena ketidakjelasan atau kesalahpahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, koordinasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan koordinasi, sumber daya dapat dialokasikan dan digunakan dengan cara yang

paling efektif, dan upaya yang duplikatif atau berlebihan dapat dihindari. Selain itu, koordinasi memungkinkan deteksi dan penanganan masalah lebih awal, sehingga mengurangi dampak dan biaya yang mungkin ditimbulkan oleh masalah tersebut.

Dalam konteks sosial, koordinasi berarti kerja sama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi adalah alat yang kuat dalam membangun tim yang solid dan produktif. Dalam organisasi, koordinasi penting untuk menghubungkan departemen dan fungsi yang berbeda agar bekerja bersama secara sinergis.

Di pemerintahan, koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dan program dari berbagai lembaga, departemen, atau tingkat pemerintahan yang berbeda. Koordinasi juga menjadi penting dalam penanggulangan bencana, di mana berbagai lembaga dan relawan harus bekerja bersama untuk memberikan bantuan dan merespon keadaan darurat.

Salah satu manfaat utama koordinasi adalah efisiensi. Dengan koordinasi yang baik, waktu dan sumber daya dapat digunakan secara efisien. Tugas dan tanggung jawab dibagi secara optimal, menghindari tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan. Ini membantu organisasi atau proyek mencapai hasil yang maksimal dengan biaya dan usaha minimal.

Koordinasi juga memungkinkan akses ke pengetahuan dan keahlian yang beragam. Ketika individu atau kelompok dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda bekerja bersama, solusi yang inovatif dan komprehensif dapat ditemukan untuk masalah yang kompleks. Meskipun koordinasi menawarkan banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya tak boleh diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah komunikasi yang efektif. Pesan yang tidak jelas atau salah diinterpretasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan kebingungan.

Selain itu, perbedaan dalam tujuan, kepentingan, atau pendekatan di antara pihak yang terlibat juga dapat menyulitkan proses koordinasi. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen dan kesepakatan bersama mengenai tujuan bersama dan bagaimana mencapainya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, komitmen, transparansi, dan komunikasi yang terbuka sangat diperlukan. Koordinasi yang berhasil memerlukan pemimpin yang efektif yang dapat mengarahkan dan mengoordinasikan upaya, serta mampu memfasilitasi kerja sama dan membangun hubungan yang baik di antara pihak yang terlibat.

Koordinasi BPBD sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana berjalan dengan lancar dan efektif. Koordinasi ini melibatkan berbagai lembaga dan pihak terkait, baik di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. BPBD berfungsi sebagai pusat komunikasi dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Koordinasi ini dilakukan dalam berbagai tahap. Pada tahap pra-bencana, BPBD mengoordinasikan upaya pencegahan dan mitigasi. Hal ini melibatkan

pendidikan masyarakat tentang risiko bencana, pelatihan tentang tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Ketika bencana terjadi, koordinasi BPBD sangat penting untuk memastikan respons cepat dan efektif. BPBD bekerja sama dengan lembaga lain seperti BMKG untuk memantau kondisi cuaca dan peringatan dini, serta dengan

SAR, TNI, dan Polri untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan. Selain itu, BPBD juga mengkoordinasikan distribusi bantuan darurat seperti makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan penunjang lainnya.

Setelah bencana, BPBD masih memainkan peran penting dalam pemulihan dan rekonstruksi. BPBD mengkoordinasikan usaha-usaha untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, memulihkan layanan publik, dan membantu masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal. Koordinasi ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.

Namun, koordinasi ini tidak tanpa tantangan. BPBD harus berhadapan dengan berbagai hambatan, termasuk kendala komunikasi, sumber daya yang terbatas, dan perbedaan prioritas antara berbagai pihak. Untuk mengatasi tantangan ini, BPBD harus terus berupaya memperkuat kapasitasnya dalam berkoordinasi, termasuk melalui peningkatan teknologi dan sistem informasi, pelatihan staf, dan kerja sama yang lebih erat dengan berbagai pihak terkait.

2.2.2 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu kondisi atau peristiwa yang tidak diinginkan. Istilah ini sering

digunakan dalam konteks penanggulangan bencana, dimana penanggulangan merujuk pada berbagai upaya untuk mencegah, merespon, dan memulihkan kondisi pasca-bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai elemen dan sektor dalam masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, menanggapi, dan pulih dari bencana. Pentingnya penanggulangan bencana tidak dapat dilebih-lebihkan, mengingat dampak fisik, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh bencana dapat sangat merusak dan menghancurkan.

Pencegahan dan mitigasi adalah dua aspek penting dari penanggulangan bencana. Pencegahan mencakup upaya untuk menghentikan bencana sebelum terjadi, melalui langkah-langkah seperti pengelolaan lingkungan yang baik, penegakan regulasi yang sesuai, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Mitigasi, di sisi lain, adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana jika bencana tersebut tak bisa dicegah. Ini bisa melibatkan aktivitas seperti penanaman hutan pelindung, perbaikan sistem drainase, dan pembangunan tanggul

banjir.

Pencegahan melibatkan langkah-langkah untuk menghindari terjadinya bencana, seperti pengendalian pembangunan di daerah rawan bencana. Sementara mitigasi berfokus pada pengurangan dampak bencana jika terjadi, seperti membangun infrastruktur yang tahan gempa atau membangun bendungan untuk mencegah banjir.

Fase persiapan melibatkan pembuatan rencana dan prosedur yang akan digunakan saat bencana terjadi. Ini mungkin termasuk pelatihan tanggap darurat, simulasi bencana, dan penyusunan rencana evakuasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa komunitas siap dan memiliki kapasitas untuk merespons bencana dengan efektif.

Ketika bencana terjadi, fase respons menjadi krusial. Langkah-langkah dalam fase ini dapat mencakup pencarian dan penyelamatan, penanganan kebutuhan medis mendesak, serta penyediaan makanan, air, dan tempat berlindung. Koordinasi yang efektif antara berbagai agen dan organisasi, baik lokal maupun internasional, sangat penting di sini.

Setelah bencana, fase pemulihan dimulai. Tujuannya adalah untuk memulihkan komunitas dan mengembalikannya ke kondisi normal atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ini bisa melibatkan pembangunan kembali infrastruktur, penyediaan dukungan psikologis untuk korban, dan upaya untuk memulihkan ekonomi lokal.

Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kerjasama dan kolaborasi, kita dapat membangun komunitas dan masyarakat yang lebih tahan terhadap bencana dan mampu pulih dari dampaknya. Dengan demikian, penanggulangan bencana adalah kunci utama untuk ketahanan dan keberlanjutan kita di masa depan. Undang-undang tahun 2007 pasal 1 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- Bencana alam Merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- Bencana non alam Merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
- Bencana sosial Merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

Pasal 33 Dalam pelaksanaan upaya menanggulangi bencana banjir, maka penanganan dan penanggulangan bencana meliputi 3 tahap yaitu:

1. Pra-Bencana

Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada juga minimal ketika terjadi bencana. Situasi tidak terjadi bencana, yaitu:

- Pengurangan resiko bencana, dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana;
- Perencanaan penanggulangan Bencana, dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana;
- Pencegahan, kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
- Pendidikan dan Pelatihan, masyarakat dan anggota penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana untuk mengurangi jatuhnya banyak korban akibat bencana, maka dalam kegiatannya dibutuhkan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, Bimtek Mitigasi Bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam menghadapi bencana bagi masyarakat yang berada dalam wilayah yang rawan bencana. Situasi terdapat potensi bencana, yaitu;
- Mitigasi, serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- Peringatan dini, upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi agar terhindar dari ancaman atau resiko bencana banjir;

- Kesiapsiagaan, kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

2. Saat Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak yang ditimbulkan. kegiatan yang dilakukan ialah:

- Penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda;
- Pemenuhan kebutuhan dasar;
- Perlindungan;
- Pengurusan pengungsi;
- Penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3. Pasca Bencana

Penanggulangan pasca bencana, tindakan utama yang harus dilakukan ada 2 yaitu:

- Rehabilitasi perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- Rekonstruksi pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban

dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.⁵

2.2.3 Banjir

Banjir adalah bencana alam yang membuat kondisi dari daratan tergenang oleh air yang bervolume berlebihan. Pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, terkadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan karena volume air meningkat.⁶

Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, daerah pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Peristiwa banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang ketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di daerah pedesaan umumnya disebabkan oleh gundulnya hutan sehingga debit air sungai meluap dan membuat banjir bandang disekitaran desa.

Bencana banjir biasanya terjadi pada musim hujan dan seringkali menimbulkan dampak yang signifikan, seperti kerusakan infrastruktur, perpindahan penduduk, dan kadang-kadang korban jiwa. Beberapa daerah yang sering terkena banjir di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, dan banyak daerah

⁵ Bencana, B. N. P. (2013). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Dipetik April, 20, 2017*.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

lainnya. Banjir bisa memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek termasuk kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur, perpindahan penduduk, dan potensi korban jiwa. Sementara dampak jangka panjangnya bisa berupa kerusakan lingkungan, seperti erosi tanah dan kerusakan habitat, serta masalah kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit yang berhubungan dengan air.

Menurut Erlangga dalam Lestari, R. W., Kanedi, I., & Arliando, Y banjir adalah genangan air yang mengalir deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Pada saat banjir, air akan menggenangi sebagian besar daratan yang biasanya tidak tergenangi air. Ketika musim hujan tiba sebagian daerah mengalami banjir. Curah hujan yang tinggi membuat beberapa daerah tergenang air. Banjir yang sangat berbahaya adalah banjir bandang yang besar dengan datangnya air secara tiba-tiba dan bersifat menghanyutkan.⁷

Banjir bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik alamiah maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Berikut adalah beberapa penyebab utama banjir:

1. Curah Hujan Tinggi: Ini adalah penyebab banjir yang paling umum. Saat curah hujan tinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, air hujan yang jatuh bisa lebih banyak daripada yang bisa diserap oleh tanah atau dialirkan oleh sistem drainase, sehingga air menumpuk dan terjadi banjir.

⁷ Lestari, R. W., Kanedi, I., & Arliando, Y. (2016). Sistem informasi geografis (sig) daerah rawan banjir di kota bengkulu menggunakan arcview. *Jurnal Media Infotama*, 12(1).

2. Pencairan Es dan Salju: Di daerah beriklim dingin, pencairan es dan salju yang berlebihan di musim semi dapat menyebabkan banjir.
3. Topografi dan Geologi Daerah: Daerah dengan topografi rendah atau cekungan biasanya lebih rentan terhadap banjir. Selain itu, daerah dengan tanah yang kurang permeabel (kurang dapat menyerap air) juga lebih rentan terhadap banjir.
4. Jebolnya Tanggul atau Bendungan: Kegagalan struktur seperti jebolnya tanggul atau bendungan bisa menyebabkan banjir yang mendadak dan sangat merusak.

-
5. Tsunami bisa menyebabkan banjir di daerah pesisir sebagai akibat dari gelombang laut yang sangat tinggi.

Selain faktor alamiah, aktivitas manusia juga bisa menyebabkan atau memperparah banjir, antara lain:

1. Pembangunan yang Tidak Terkontrol: Pembangunan yang tidak memperhatikan kapasitas dan kebutuhan drainase bisa menyebabkan air hujan tidak dapat dialirkan dengan baik, sehingga terjadi banjir.
2. Penebangan Hutan: Hutan berperan penting dalam menyerap air hujan. Penebangan hutan bisa mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir.
3. Pencemaran Sungai: Penumpukan sampah atau limbah di sungai bisa mengurangi kapasitas alir sungai dan menyebabkan banjir.
4. Perubahan Iklim: Perubahan iklim bisa meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir.

Peningkatan permukiman dan pembangunan infrastruktur telah mengurangi kapasitas tanah untuk menyerap air, sehingga meningkatkan aliran air permukaan yang berujung pada banjir.

Dampak dari banjir di Indonesia sangat luas. Secara fisik, banjir dapat menyebabkan kerusakan pada rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian. Secara ekonomi, banjir dapat merusak produktivitas dan mengakibatkan kerugian finansial. Dampak sosial meliputi pengungsian, korban jiwa, dan trauma. Sementara itu, secara lingkungan, banjir dapat menyebabkan erosi tanah, kontaminasi air, dan kerusakan habitat.

Untuk menanggulangi banjir, Indonesia membutuhkan strategi yang komprehensif dan multi-sektoral. Pada tahap pencegahan, perencanaan tata ruang yang berorientasi pada konservasi sangat penting. Hal ini mencakup peningkatan ruang terbuka hijau, pembatasan pembangunan di daerah rawan banjir, serta pengelolaan hutan dan ekosistem lainnya untuk menjaga siklus air. Ketika banjir terjadi, sistem peringatan dini yang efektif dan koordinasi antara lembaga-lembaga seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SAR, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat harus berfungsi dengan baik. Kapasitas masyarakat lokal dalam penanggulangan bencana juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan.

Penanganan bencana banjir umumnya melibatkan beberapa tahap pada pelaksanaannya pra-bencana (mitigasi dan persiapan), respons bencana, dan pemulihan pasca-bencana. Upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana banjir, ini bisa meliputi pembangunan infrastruktur penahan banjir seperti tanggul

dan saluran drainase, penanaman pohon di daerah aliran sungai, dan pengendalian penggunaan lahan. Persiapan pra-bencana bisa meliputi pembuatan dan pelatihan rencana evakuasi, pembangunan fasilitas penampungan sementara, dan pendidikan masyarakat tentang tindakan yang harus diambil saat banjir terjadi. Dalam pelaksanaannya Ini melibatkan evakuasi dan penyelamatan korban, penyediaan bantuan medis darurat, dan distribusi bantuan logistik seperti makanan, air, dan perlengkapan kebersihan. Organisasi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), dan berbagai *Non-Government Organization* (NGO) seringkali berperan penting dalam tahap ini. Di saat tahap pemulihan dimulai. Ini bisa melibatkan perbaikan dan rekonstruksi infrastruktur dan rumah yang rusak, pembersihan dan sanitasi lingkungan, rehabilitasi lahan pertanian, dan dukungan psikososial untuk korban.

Penanganan banjir di kota ini membutuhkan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat. Sebelum musim hujan, BPBD Kota Tangerang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan serangkaian upaya mitigasi banjir. Upaya ini melibatkan pembersihan saluran drainase dan sungai dari sampah dan endapan yang bisa menghambat aliran air, pembangunan dan perbaikan infrastruktur penahan banjir seperti tanggul dan pompa air, serta penataan ulang kawasan rawan banjir.

Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya untuk merencanakan penanggulangan bencana, termasuk menyiapkan titik-titik evakuasi dan logistik bantuan darurat. Edukasi dan pelatihan

penanggulangan bencana juga dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi banjir.

Ketika banjir terjadi, BPBD Kota Tangerang bergerak cepat untuk merespons. Tim reaksi cepat dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan penyelamatan korban. BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, dan organisasi lainnya untuk menyediakan layanan medis darurat dan bantuan logistik bagi korban. Setelah banjir surut, fokus beralih ke pemulihan dan rehabilitasi. BPBD bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah kota dan organisasi non-pemerintah untuk membersihkan area yang terkena dampak, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal.

Mengingat bahwa banjir adalah bencana alam yang berulang, BPBD Kota Tangerang juga berupaya melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap respons dan penanganan bencana, serta merancang strategi dan rencana penanggulangan bencana yang lebih baik di masa mendatang.

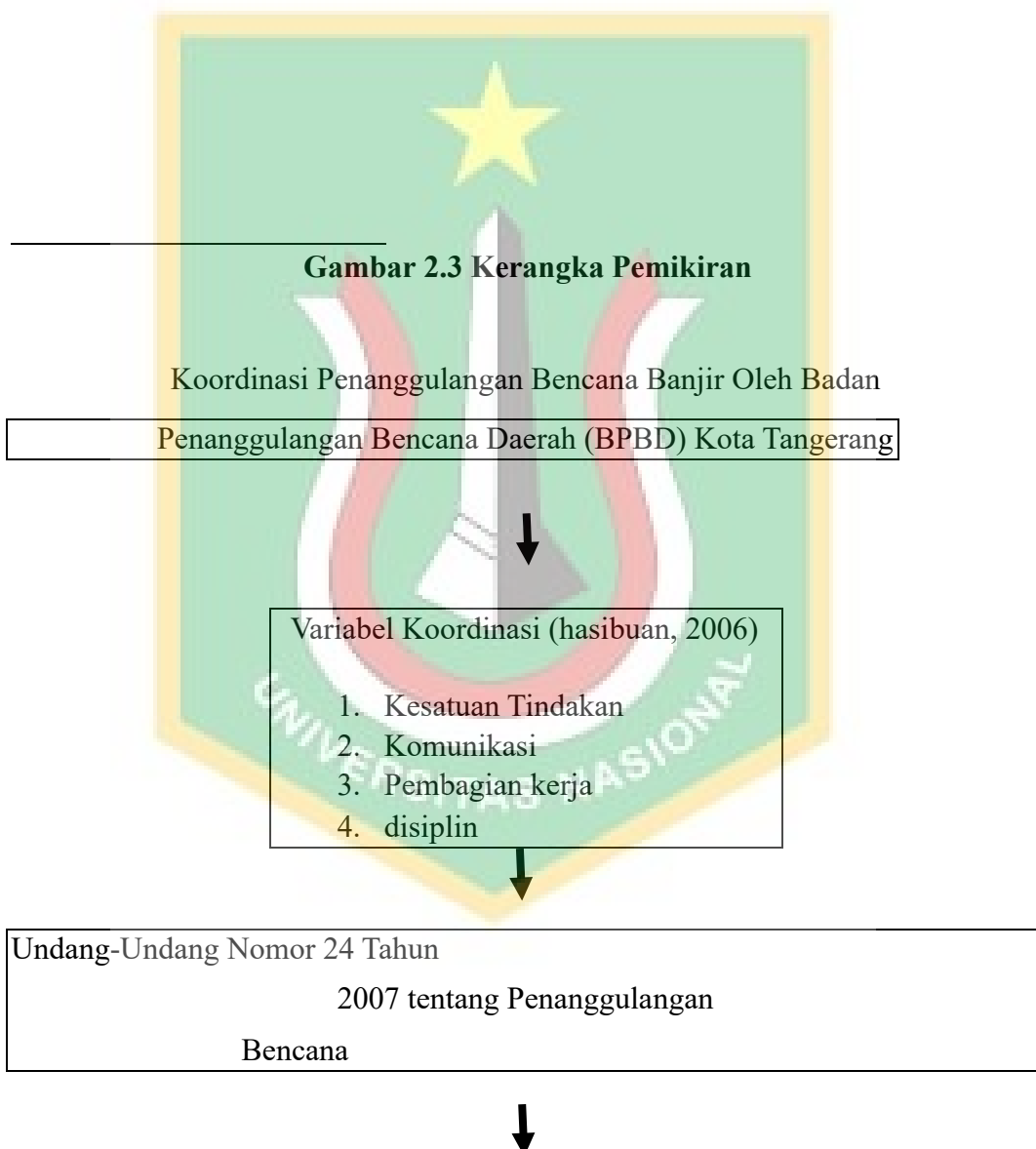
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan saya sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari strategi BPBD dalam menanggulangi bencana banjir, maka dalam penelitian ini dibuatkanlah kerangka berfikir. Sehingga dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca mudah memahami dan mengamahi tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

Menurut Sugiyono mendefinisikan kerangka pemikiran merupakan model

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁸

Berikut dibawah ini kerangka pemikira yang penulis susun:



⁸ Musyadad, A., Handayani, R., & Haris, D. M. (2015). *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Hasil Dari Upaya Koordinasi
Penanggulangan Bencana Banjir

Sumber: Hasil Olahan Penulis

